

**ABSTRAK**  
**KEBIJAKAN *RUISLAG* TANAH KAS DESA (TKD)**  
**YANG DIGUNAKAN UNTUK JALAN TOL TRANS JAWA**  
**LOKASI BATANG – SEMARANG**

Pemerintah pusat saat ini masih melakukan percepatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana dengan membuat jalan tol, pelabuhan, bandar udara, pembangkit listrik dan sebagainya. Salah satu lokasi yang terkena dampak pembangunan jalan Tol yakni di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang. Ada 3 (tiga) bidang Tanah Kas Desa (TKD) milik Pemerintah Desa Kandeman yang dilepaskan hak atas tanahnya untuk kepentingan nasional tersebut.

Dalam *ruislag* Tanah Kas Desa (TKD) Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang ingin menjawab permasalahan yaitu : 1). Bagaimana kebijakan *ruislag* Tanah Kas Desa yang digunakan untuk jalan tol di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, 2). Apa saja hambatan dan kendala *ruislag* Tanah Kas Desa yang digunakan untuk jalan tol di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, 3). Bagaimana solusinya untuk mengatasi hambatan *ruislag* Tanah Kas Desa yang digunakan untuk jalan tol di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Permasalahan di analisis dengan teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan, 1). Kebijakan *ruislag* Tanah Kas Desa (TKD) Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta pelaksanaannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Desa Nomor 143/1/2017 tentang Tukar – Menukar Tanah Kas Desa Kandeman Untuk Pembangunan Jalan Tol Batang – Semarang dengan ditindak lanjuti pembuatan akta Notariil yakni Akta Pelepasan Hak Atas Tanah, 2). Hambatan – hambatan yang timbul antara lain : kurang tertibnya terkait administrasi kependudukan masyarakat akan pentingnya sertifikat yang dimilikinya serta tidak terpeliharanya patok – patok batas bidang tanah didapat karena peninggalan harta warisan dari orang tua, 3). Solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam *ruislag* Tanah Kas Desa (TKD) Desa Kandeman antaranya adanya pendampingan dari kantor Notaris dan Pemerintah Desa kepada pemilik tanah terkait kepengurusan administrasi kependudukan maupun surat – surat yang dibutuhkan sebagai persyaratan serta Notaris harus bersifat fleksibel dalam menjalankan profesinya dengan mengedepankan asas pelayanan dan asas kemanusiaan dengan tidak harus mewajibkan para pihak untuk datang ke kantor melainkan berkumpul di manapun berada dengan waktu dan satu tempat secara bersamaan.

**Kata Kunci : Kebijakan *ruislag*; Tanah Kas Desa; Jalan Tol Batang**

## ABSTRACT

### ***RUISLAG* TANAH KAS DESA (TKD) POLICY USED FOR TRANS JAVA TOLL ROADS LOCATION BATANG - SEMARANG**

The central government is currently still accelerating the development of infrastructure facilities and infrastructure by making toll roads, ports, airports, power plants and so on. One of the locations affected by the toll road construction is in Kandeman Village, Kandeman District, Batang Regency. There are 3 (three) areas of Land Cash Village (TKD) owned by the Kandeman Village Government which have their land rights released for the national interest.

In the Village Land Cash Plan (TKD) Kandeman Village, Kandeman District, Batang District, wanted to answer the problems, namely: 1). How is the Village Cash Land *ruislag* policy used for toll roads in Kandeman Village, Kandeman District, Batang District, 2). What are the obstacles and constraints of Village Cash Land *ruislag* used for toll roads in Kandeman Village, Kandeman District, Batang District, 3). How is the solution to overcome the obstacles to village land use *ruislag* used for toll roads in Kandeman Village, Kandeman District, Batang District.

This research is analytical descriptive with an empirical juridical approach, while data is obtained through field research and library research. Furthermore, the data were analyzed qualitatively. The problem is analyzed by the theory of legal certainty and the theory of benefit.

From the results of this study concluded, 1). Land Cash Village (TKD) *ruislag* policy in Kandeman Village, Kandeman District, Batang District, was carried out based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest, as well as the implementation of Presidential Regulation Number 3 of 2016 concerning Acceleration of the Implementation of National Strategic Projects and Village Number Regulations 143/1/2017 concerning Exchange - Swapping Land Cash for Kandeman Village For the construction of the Batang - Semarang Toll Road by following up on the creation of Notarial Deed, namely the Deed of Land Rights, 2). Obstacles that arise include: lack of discipline regarding the administration of population demographics regarding the importance of the certificate they have as well as the maintenance of stakes - land boundary stakes are obtained due to the inheritance of inheritance from parents, 3). The solution to overcome the obstacles that occur in the Village Land Cash (TKD) *ruislag* of Kandeman Village is that there is assistance from the Notary's office and the Village Government to the landowners related to the management of population administration and the letters needed as a requirement and the Notary must be flexible in carrying out the process by prioritizing the principle of service and the principle of humanity do not have to require parties to come to the office but gather everywhere with time and one place simultaneously.

**Keywords:** *Ruislag* policy; Ground the village treasury; Batang Toll Road